



SOSIALISASI PROGRAM PDPD JKN PERLU DIGENCARKAN

11,48 Persen Penduduk Yogya Berstatus Non Aktif

YOGYA (KR) - Tingkat kepesertaan penduduk Kota Yogya dalam program dari Badan Penyelenggara Jaminan Perlindungan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah sangat tinggi. Akan tetapi terdapat 11,48 persen atau 47.390 jiwa yang statusnya non aktif karena berbagai hal.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogya Muhammad Ali Fahmi SE MM, menyebut status kepesertaan non aktif dalam BPJS Kesehatan tersebut menjadi pencerematan komisinya.

"Kalau kita lihat, tingkat kepesertaan di Kota Yogya mencapai 415.114 jiwa. Ini sudah sangat tinggi karena semua masyarakat mampu terlindungi oleh jaminan kesehatan. Namun peserta yang statusnya non aktif ternyata juga cukup tinggi. Kondisi ini harus bisa diurai," tandasnya, Minggu (7/1).

Dari penelusuran serta hasil rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah terkait, status kepesertaan BPJS Kesehatan yang non aktif tersebut disebabkan berbagai hal. Di antaranya tunggakan premi atau iuran yang dialami peserta mandiri, peserta yang sudah tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan iur (PBI) maupun sebab lain.

Menurut Fahmi, status peserta yang non aktif bisa menimbulkan persoalan manakala yang bersangkutan mengalami masalah kesehatan dan hendak mengakses jaminan.

Di sisi lain, Pemkot Yogya sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk jaminan kesehatan. Tahun ini alokasi anggaran tersebut mencapai Rp 34 miliar.

"Anggaran untuk jaminan kesehatan daerah itu kan salah satunya untuk mengakses layanan kesehatan secara gratis oleh masyarakat. Peserta BPJS Kesehatan yang statusnya non aktif ini perlu dicarikan solusinya," imbuhnya.

Upaya yang dilakukan Pemkot Yogya atas akses layanan kesehatan sebetulnya juga sangat optimal. Terutama dengan adanya program Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PDPD). Melalui program tersebut masyarakat yang terkendala untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis bisa ter-

akomodasi. Oleh karena itu memasuki awal tahun ini Pemkot Yogya bisa lebih mengencangkan sosialisasi program PDPD mengingat alokasi anggaran jaminan kesehatan yang sangat tinggi.

Fahmi berharap, kader kesehatan yang ada di wilayah bisa menjadi perantara informasi keberadaan program PDPD tersebut. Dengan harap-

an, penduduk Kota Yogya yang status kepesertaan BPJS Kesehatan nya non aktif dapat segera mengikuti program itu. Pasalnya, untuk mengakses program PDPD butuh partisipasi aktif masyarakat dengan mengajukan pendaftaran secara mandiri.

"Misalnya peserta mandiri yang mengalami tunggakan sehingga statusnya non aktif bisa ma-

suk dalam PDPD. Ini harus disosialisasikan. Jangan sampai hak masyarakat atas kesehatan menjadi terganggu karena status BPJS Kesehatan non aktif," tandasnya.

Saat ini iur BPJS Kesehatan kelas I mencapai Rp 150.000, kelas II Rp 100.000 dan kelas III Rp 42.000. Khusus kelas III, ada subsidi dari pemerintah sehingga cukup mem-

bayar Rp 35.000. Bagi peserta kelas I dan II yang menunggak dan mendaftarkan program PDPD, tetap harus melunasi tunggakannya. Sedangkan ketika masuk dalam program PDPD maka fasilitas kesehatan tingkat pertama berada di puskesmas, dan ketika menjalani perawatan di rumah sakit berada di kelas III. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005